Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)
Vol.2, No.11, 2023: 1716-1732

Digitizing Halal Tourism and Designing Muslim-Friendly Tourism Categorization as an Effort to Minimize Uncertainty in Halal Tourism in Blitar Raya

Moh Farih Fahmi[1]*, Moch Khoirul Anwar[2], Sri Abidah Suryaningsih[3], Arasyi Fahrulloh[4], Clarashinta Canggih[5], Rahmad Syaifudin[6]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Surabaya
[6]Universitas Tulungagung
Corresponding Author: Moh Farih Fahmi mohfahmi@unesa.ac.id

ARTICLEINFO

Keywords: Muslim Friendly Tourism, Categorization and Digitalization of Tourism, Blitar Raya

Received : 21, September
Revised : 22, October
Accepted: 30, November

©2022 Fahmi, Anwar, Suryaningsih, Fahrulloh, Canggih, Syaifudin: This is an open-access article distributed under the termsof the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

Halal tourism in practice is still full of uncertainty. This is due to inconsistency from Muslims, especially in Blitar Raya. This article will discuss three issues, the first is about why halal tourism is still full of uncertainty, the second is designing a Muslim-friendly tourism categorization that supports the implementation of Muslim-friendly tourism and the third is discussing the digitalization of quality Muslim-friendly tourism. This research uses a qualitative method with a mixed approach. The first result of this research is that Muslim-friendly tourism has a high level of uncertainty and causes inconsistencies. Second, uncertainty regarding Muslim-friendly tourism can be minimized by categorizing Muslim-friendly tourism starting from the red, yellow and green categories. Third, this categorization needs to be supported by digitalization to encourage the availability of Muslim-friendly tourism in Blitar Raya.

Digitizing Halal Tourism and Designing Muslim-Friendly Tourism Categorization as an Effort to Minimize Uncertainty in Halal Tourism in Blitar Raya

Moh Farih Fahmi[1]*, Moch Khoirul Anwar[2], Sri Abidah Suryaningsih[3], Arasyi Fahrulloh[4], Clarashinta Canggih[5], Rahmad Syaifudin[6]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Surabaya
[6]Universitas Tulungagung
Corresponding Author: Moh Farih Fahmi mohfahmi@unesa.ac.id

ARTICLEINFO

Kata Kunci: Muslim Friendly Tourism, Categorization and Digitalization of Tourism, Blitar Raya

Received : 21, September
Revised : 22, October
Accepted: 30, November

©2022 Fahmi, Anwar, Suryaningsih, Fahrulloh, Canggih, Syaifudin: This is an open-access article distributed under the termsof the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRAK

Pariwisata halal dalam praktikknya masih penuh ketidak pastian. Hal ini disebabkan inkonsistensi dari Muslim, khususnya di Blitar Raya. Artikel ini akan membahas tiga masalah, yang pertama tentang mengapa pariwisata halal masih penuh ketidak pastian, kedua mendesain kategorisasi wisata ramah muslim yang mendukung implementasi pariwisata ramah muslim dan ketiga membahas digitalisasi pariwisata ramah muslim yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mix. Hasil dari penelitian ini yang pertama pariwisata ramah muslim memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan menyebabkan adanya inkonsistensi. Kedua, ketidakpastian pada pariwisata ramah muslim dapat diminimalisir dengan upaya kategorisasi wisata layak muslim mulai dari kategori merah, kuning, hijau. Ketiga, kategorisasi itu perlu didukung dengan digitalisasi untuk mendorong tersedianya pariwisata ramah muslim di Blitar Raya.

PENDAHULUAN

Pariwisata halal adalah konsep pariwisata yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam(May F.A et al., 2020). Pariwisata halal mencakup berbagai aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti makanan halal, akomodasi yang ramah Muslim, fasilitas ibadah, dan pengalaman wisata yang sesuai dengan tuntunan agama(Choirunnisa & Firmansyah, 2021). Dalil-dalil yang menguatkan konsep pariwisata halal dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Misalnya, Al-Quran Surah Al-Ma'idah (5:5) yang menyebutkan tentang makanan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Muslim (al) Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, 2008). Hadis juga menyebutkan pentingnya menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang haram dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pariwisata halal didasarkan pada pemahaman dan praktik agama Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kesucian, kesehatan, dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata halal memberikan fasilitas bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah, menghargai budaya dan sejarah Islam, serta menikmati pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam.

Industri pariwisata halal telah menjadi salah satu segmen yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pariwisata halal menjadi salah satu aspek yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia(Rahmi, 2020). Dengan populasi Muslim yang semakin meningkat dan kesadaran akan kebutuhan dan preferensi mereka, permintaan akan pengalaman pariwisata yang memenuhi syariah Islam juga semakin tinggi. Perkembangan pariwisata halal yang semakin meningkat bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1 Perkembangan Wisata Muslim 2015 - 2021

Tahun 2015	**Tahun 2015: 108 juta wisatawan Muslim**
Tahun 2016	Tahun 2016: 117 juta wisatawan Muslim
Tahun 2017	Tahun 2017: 121 juta wisatawan Muslim
Tahun 2018	Tahun 2018: 131 juta wisatawan Muslim
Tahun 2019	Tahun 2019: 140 juta wisatawan Muslim
Tahun 2020	Tahun 2020: 63 juta wisatawan Muslim (terpengaruh oleh pandemi COVID-19)
Tahun 2021	Tahun 2021: 95 juta wisatawan Muslim (perkiraan

Sumber: GMTI 2022 (Mastercard-Crescentrating, 2022)

Berdasarkan data diatas memberikan gambaran bahwa memang sejak tahun 2015 masyarakat dunia sudah sangat mementingkan pariwisata yang berlabel halal. Wisatawan muslim membutuhkan tempat berwisata yang memang ramah untuk keyakinan mereka (Choirunnisa dan Firmansyah, 2021). Sehingga memang dalam implementasi pariwisata halal harus memenuhi beberapa aspek dan indikator Muslim Friendly dalam pariwisata yang laizm dipakai sebagai acuan melihat apakah pariwisata sudah ramah bagi muslim.

Indikator Muslim Friendly adalah seperangkat kriteria dan standar yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan dan fasilitas yang disediakan oleh destinasi wisata memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan Muslim.

Industri pariwisata halal yang secara subjektif banyak diidam-idamkan oleh masyarakat muslim nyatanya masih diperdebatkan urgensinya(Usrah et al., 2021). Sebagian menganggap bahwa pariwisata tidak perlu dilabeli halal dan dilain sisi ada yang menginginkan pariwisata diberi label halal. Perdebatan ini kaitannya dengan status hukum dari pariwisata halal yang menurut fiqih sangat mungkin ditafsirkan berbeda tergantung dari maqashid syariahnya ketika berijtihad menentukan hukum fiqih pada pariwisata halal. Selain itu, perdebatan ini kaitannya dengan implementasi pariwisata halal yang seoalah olah tidak perlu diberikan status hukum dimana status hukum itu harusnya untuk wisatawannya dan bukan untuk tempatnya. Selain itu perdebatan ini terjadi ketika dikaitkan dengan kepentigan ekonomi yang meyertai implementasi pariwisata hala(Usrah et al., 2021)l. Impementasi label halal dalam pariwisata dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim, mereka dapat menarik pangsa pasar yang signifikan dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Namun, dengan adanya kepentingan ekonomi menjadikan orang lain yang tidak setuju akan dengan mudah mengatakan bahwa pelabelan halal hanya untuk marketing dan bukan untuk kepentingan ibadah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah muncul anggapan pelabelan tersebut hanya untuk menjual agama demi keuntungan industry (Fahmi, Binti Mutafarida, et al., 2023). Sehingga perdebatan ini semakin melebar dan mempengaruhi ruang lingkup penerapannya yang menjadi lebih terbatas. Beberapa pihak berpendapat bahwa memberikan label halal pada pariwisata dapat menjadi sulit dalam praktiknya. Terdapat tantangan teknis dan logistik yang melibatkan sertifikasi makanan, akomodasi, dan fasilitas lainnya di seluruh destinasi wisata.

Impelementasi pelabelan halal untuk pariwisata akan menyebabkan inkulisifitas bagi sebagian orang namun dilain pihak memunculkan toleransi. Argumentasi bahwa pariwisata harus bersifat inklusif dan terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Menekankan label halal dapat memunculkan perpecahan dan mendorong diskriminasi dalam sektor pariwisata. Namun, bagi orang yang setuju dengan pelabelan halal menganggap ini adalah bentuk toleransi, dimana ketika ada muslim berwisata di bali yang identik dengan hindu masih dimungkinkan. Begitu juga dengan non-muslim yang boleh saja mengunjungi tempat wisata yang identik dengan muslim, makam waliyullah misalkan. Sehigga perdebatan ini seringkali bersifat subjetif karena masuk bagian dari tanggung jawab pribadi.

Argumentasi dalam konteks tanggung jawab pribadi menganggap bahwa wisatawan Muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehalalan makanan, fasilitas ibadah, dan praktik-praktik lainnya sesuai dengan keyakinan mereka. Menyandarkan sepenuhnya pada label halal dapat mengurangi tanggung jawab pribadi dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Namun, disisi lain adanya pelabelan halal dianggap sebagai perlindungan konsumen. Hal tersebut dianggap mampu memberikan jaminan dan kepercayaan bagi wisatawan Muslim baik lokal ataupun mancanegara (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Label halal dapat membantu konsumen memilih dengan lebih bijaksana dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip halal. Penting untuk diingat bahwa perdebatan ini melibatkan sudut pandang yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, nilai-nilai keagamaan, dan pertimbangan sosial. Adanya sudut pandang yang seimbang dapat menjadi acuan standar pelabelan halal yang jelas, transparan, dan pemahaman yang saling menghormati antara semua pihak terlibat dalam pariwisata halal.

Upaya untuk mencari titik temu dari beberapa perdebatan sebelumnya adalah dengan cara melihat kemanfaatan dari pelabelan halal untuk pariwisata dengan mencari standar halal untuk pariwisata halal dan alternatifnya. Hal ini bertujuan agar persepsi Muslim tentang pariwisata halal bisa diterima yang salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan kategorisasi pariwisata halal yang ramah untuk muslim. Untuk memaksimalkan upaya itu tentu bisa didukung dengan pengembangan aplikasi sebagai bentuk digitalisasi pariwisata halal (Fernardo Et Al., 2020). Langkah ini akan mendorong pariwisata halal lebih berkembang dan semua pengguna aplikasi bisa terlibat dalam memberikan penilaian pada tempat wisata yang dituju. Namun, upaya ini masih sebatas implementasi kecil dari upaya untuk menegaskan manfaat dan pentingnya pariwistaa halal yang harus diakui masih tidak konsisten dan penuh ketidak pastian.

Berkaitan dengan pentingnya pariwisata halal bagi muslim tentu perlu adanya kajian lebih dalam mengingat pariwisata halal yang penerapannya masih bias, atau dalam artian pariwisata halal sebenarnya masih belum ada kepastian. Banyak hal yang menjadikan fenomena ini terjadi dan banyak orang yang saling klaim terkait pentingnya wisata halal bagi muslim. Maka dari itu, pada artikel ini akan membahas tiga hal penting berkaitan dengan dengan pentingnya pariwisata halal yang penuh ketidak pastian. Permasalahan pertama yang dibahas adalah tentang mengapa pariwisata halal masih penuh ketidak pastian, kedua mendesain kategorisasi wisata ramah muslim yang mendukung implementasi pariwisata halal dan yang terahir adalah digitalisasi pariwisata halal yang ideal dan alternatif aplikasi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pariwista. Permaslahan ini akan dikaji secara spesifik di salah satu wilayah di Jawa Timur, yaitu di Blitar Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dipilihnya Blitar Raya sebagai lokasi kajian terhadap persoalan yang dipaparkan sebelumnya karena di Blitar Raya relatif cukup lengkap tempat wisatanya. Misalkan adanya wisata alam, wisata searah, wisata religi dan wisata modern. Namun, yang paling penting adalah citra Blitar Raya yang nasionalis dampak dari adanya citra presiden pertama Indonesia yang kebetulan dimakamkan di Kota Blitar (Muspita, 2022). Sehingga secara kultur Blitar Raya tidak diidentikan sebagai wilayah religius layaknya Kabupaten

Jombang dan Kabupaten Kediri dengan indikator jumlah pesantren yang cukup banyak. Namun, bukan berarti Blitar Raya tidak agamis, hanya saja kesan nasionalis yang seoalah mengubur kepedulian Blitar Raya sebagai wilayah yang menyediakan pariwisata halal. Berkaitan dengan alasan itu kajian terhadap permasalah ini akan lebih objektif karena dilakukan di wilayah yang tidak identik dengan tingkat religiusitasnya melainkan citra nasionalis yang lebih terlihat.

METODOLOGI

Desain penelitian pada artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan campuran, yaitu fenomenologi dan pendekatan maqashid syariah. Kedua pendekatan itu akan digunakan dalam kajian tentang pariwisata halal yang penuh ketidak pastian di Blitar Raya dan menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk mendesain kategorisasi yang akan digunakan sebagai alternatif untuk menentukan pelabelan wisata ramah muslim, khususnya di Blitar Raya. Lokasi Penelitan dilakukan di Blitar Raya yang terdiri dari dua wilayah yaitu kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik yang lazim digunakan yaitu wawancara, observasi dan dikuatkan dengan studi lieteratur yang dianggap relevan. Data yang diperoleh akan diolah melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, analisis data, validasi dan penarikan kesimpulan yang kemudian dijadikan sebagai implikasi teoritik dari temuan penelitian. Implikasi tersebut berkaitan dengan pariwisata halal, pengembangan destinasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pariwisata dan simulasi implementasi aplikasi travel track di Blitar Raya.

PEMBAHASAN

Mengapa Pariwisata Halal Masih Penuh Ketidak Pastian?

Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tentu aneh ketika ketersediaan pariwisata halal belum banyak tersedia. Hal ini memandakan bahwa pariwisata halal masih penuh ketidak pastian. Pariwisata halal yang penuh ketdak pastian tersebut dipilah menjadi dua yaitu tidak pastian secara ekonomi dan ketidak pastian secara implementasi fiqihnya, sehingga memunculkan inkonsistensi dalam penerapannya. Ketidak pastian pariwisata halal dilihat dari sisi teori ketidak pastian menyadarkan kita bahwa memang ketidak pastian merupakan hal yang wajar dalam ekonomi. Artinya, adanya ketidak pastian pariwisata halal adalah kepastian bahwa pariwisata halal harus beradaptasi.

Teori tidak pastian yang dicetuskan oleh Charles R. Berger dan Richard J. Calabrese yang menyatakan bahwa ketidakpastian merupakan Situasi dimana mansuia tidak memiliki informasi yang cukup atau jelas mengenai situasi atau orang lain dalam interaksi sosial(Fahham, 2017). Ketidakpastian ini mencakup ketidakpastian tentang perilaku, niat, preferensi, atau sifat individu lainnya. Jika dikaitkan dengan ketidak pastian pariwisata halal, khususnya di Blitar Raya tentu sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Charles Berger. Wisatawan Blitar Raya sering kali terbius dengan informasi tentang kisah heroik dari sang proklamator sehingga terlalu memuja dan berlama – lama di makam sang proklamator yang jika direnungkan maka itu tindakan yang berlebihan,

dimana tindakan berlebih lebihan itu dilarang dalam agama Islam (Ali, 2018). Sehingga tindakan wisatawan tersebut menjadi tidak pasti apakah masih dalam koridor nilai – nilai keislaman atau tidak.

Teori dari Charels Berger seolah memberikan penegasan untuk memastikan pariwisata halal itu sangat jauh dari mungkin. Hal ini dikarenakan kepastian yang diinginkan oleh sebagian orang untuk memberikan kepastian halal akan bertabrakan dengan perilaku, preferensi dan niat manusia yang tidak diketahui sehingga menjadi tidak pasti (Fikriyah, 2021). Sama halnya jika di salah satu pantai di Blitar Raya yang susah untuk membedakan apakah pengunjung perempuan dan laki – laki yang datang merupakan pasangan yang sah, atau bahkan pasangan selingkuh atau mereka datang untuk mencuri dan tindakan kriminal lain. Jika ada pendapat seperti yang pernah didengungkan di salah satu wilayah di Indonesia yang ingin memisahkan pengunjung perempuan dan lelaki tentu di Blitar Raya hampir tidak mungkin bisa terwujud karena kultur wilayahnya yang nasionalis dan kemungkinan berujung pada klaim intoleransi dan mencederai hak asasi manusia. Hal ini dikuatkan dengan teori dari Firz Heider bahwa manusia akan cenderung memberikan pembenaran atas tindakan dan merespon tindakan orang lain, atau yang disebut dengan atribusi (Erawati & Gloria Maindo Mau Pelu, 2021).

Tindakan atribusi tersebut memunculkan sikap *self-serving bias* ketika individu cenderung memberikan atribusi internal positif untuk keberhasilan pribadi mereka sendiri, sementara memberikan atribusi eksternal untuk kegagalan mereka (Deffains et al., 2016). Misalnya, ketika orang yang setuju dengan pariwisata halal dia akan merasa bahwa dia adalah muslim yang baik, sedangakan orang lain yang tidak setuju adalah bukan muslim yang baik. Sehingga *self-serving bias* ini menjadikan persepsi adanya pariwisata halal akan semakin jauh karena sikap wisatawan muslim yang merasa butuh layanan pariwisata halal bertindak tidak halal karena bersikap *self-serving bias* dan sebenarnya persepsi orang tersebut menunjukkan bahwa pariwisata halal tidak bisa dipastikan secara penuh kehalalannya.

Situasi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dari implementasi pariwisata halal, sehingga terjadi ketidak pastian pada pariwisata halal. Inkonsistensi dalam pariwisata halal dapat terjadi karena beberapa faktor. Berikut adalah beberapa bentuk inkonsistensi yang sering terjadi dalam konteks pariwisata halal. Inkonsistensi pertama adanya label "Halal" yang Tidak Terverifikasi. Beberapa destinasi pariwisata sering mengklaim mereka sebagai "halal" tanpa memiliki sertifikasi atau verifikasi yang sesuai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi wisatawan Muslim yang mendambakan wisata halal untuk menentukan kehalalan pariwisata. Dalam konteks ini, yang sudah diimplementasikan di Blitar Raya hanya pada penyediaan makanan dan minuman yang sudah tersertifikasi halal oleh pendamping proses produk halal (PPH). Namun, diluar itu belum ada standar yang jelas yang mengakibatkan ketidak pastian adanya pariwisata halal di Blitar Raya.

Inkonsistensi dalam bentuk klaim sepihak dari pengelola wisata tentu merupakan hal yang lazim, karena pengelola wisata di Blitar Raya kebanyakan menganggap status halal dipersepsikan sepeerti *selfdeclare* pada sertifikasi halal

untuk makanan. Hal ini tentu berbeda karena sertifikasi makanan dan minuman sudah jelas standarisasinya. Sedangkan untuk pariwisata? Tentu harus diakui masih belum ada standar yang jelas dari pihak berwenang sehingga muncul banyak versi seperti versi dari GMTI atau lembaga lainnya. Sehingga lagi – lagi ada ketidak pastian terkait pariwisata halal yang harus dihadapi. Belum lagi tidak adanya monitoring atau evaluasi terkait klaim halal oleh pengelola wisata di Blitar Raya. Namun, kalim tersebut tidak bisa disalahkan tetapi hanya perlu diverifikasi. Bisa jadi klaim tersebut benar karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama bulan maret hingga mei praktik penyelenggaraan wisata di Blitar Raya khususnya di Makam Bung Karno, Pantai Tambak dan Candi Penataran meskipun tidak bisa dinilai dengan status sangat halal, paling tidak sudah aman dari status haram atau wisata yang tidak layak muslim (Fahmi, Prahara, et al., 2023).

Ketidak pastian selanjutnya berkaitan dengan ekspektasi budaya pada pariwisata halal. Hal ini menjadi salah satu bentuk inkonsistensi pariwisata halal karena memasukkan aspek budaya dalam pariwisata halal. Memang lucu jika ada orang yang masih mempermasalahkan relevansi budaya dengan agama karena pada dasarnya budaya tidak pernah berseberangan dengan agama(Fahmi et al., 2021). Ketidak pastian dalam konteks ini di Blitar Raya adalah ketika ada wisatawan Muslim berwisata di Candi penataran yang memang faktanya candi tersebut sangat identik dengan agama Hindu. Tetapi, salah satu pusat wisata di Blitar Raya adalah Candi Penataran dan berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan pengunjung tahun 2021 – 2022 pengunjung terbanyak adalah muslim. Hal ini tentu aneh mengingat muslim yang harusnya mengunjungi tempat – tempat Islami malah datang ke tempat yang digunakan ibadah oleh agama lain. Kemudian pertanyaannya adalah apakah muslim haram mengunjungi tempat tersebut dan apakah mungkin Candi Penataran diberikan label halal. Hal ini tentu menunculkan ketidak pastian lagi dari status tempat wisata tersebut.

Maka dari itu, ekspektasi budaya tentu harus dimaknai sebagai penghormatan atas hasil pemikiran manusia yang mampu membentuk adat dan etika yang pada akhirnya disepakati. Hal ini jika dikaitkan dengan maqashid syariah bisa dikatakan sebagai metode *al-Urf* (Muspita, 2022). Selama kita menghargai budaya maka tidak ada yang perlu diragukan untuk berwisata di Candi Penataran yang identik dengan agama Hindu selama tidak ikut menyembah apa yang disembah ditempat wisata tersebut. Sehingga dari adanya *al-Urf* menjadikan sangat mungkin untuk memberikan label halal di Candi Penataran. Kehalalan ini tentu bisa diperdebatan dan pasti memunculkan ketidak pastian lagi. Namun, perlu dipertegas dalam hal ini, kehalalan adalah bukti yang menunjukkan bahwa tempat wisata yang dikunjungi adalah wisata yang ramah dan layak untuk muslim di Blitar Raya.

Penting untuk diingat bahwa inkonsistensi dalam pariwisata halal tidak berarti bahwa semua destinasi atau layanan pariwisata yang ada di Blitar Raya tidak dapat dikunjungi. Banyak tempat wisata di Bliar Raya yang secara benar berupaya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Namun, sebagai wisatawan, perlu bersikap bijak karena ketidak pastian diberikannya label halal untuk pariwisata merupakan kepastian yang harus dihadapi dan disikapi secara adaptif. Sehingga perlu bagi muslim untuk mencari informasi yang detail sebelum memilih destinasi atau layanan pariwisata halal dengan kategorisasi yang jelas dan didukung dengan digitalisasi supaya bisa lebih efektif dan bisa meminimalisir ketidak pastian pada pariwisata halal.

Desain Kategorisasi Wisata Ramah Muslim yang Mendukung Implementasi Pariwisata Halal

Impementasi pariwisata halal harus didukung dnegan adanya kategorisasi wisata ramah atau layak muslim. Hal ini perlu dilakukan supaya pariwisata halal tidak terkooptasi hanya pada dua status hukum yaitu halal dan haram. Pariwisata halal perlu didesain supaya bisa lebih fleksibel dan bisa menarik wisatawan non-muslim sebagai penegasan *Islam Rahmatan lil Alamin* (Fahmi, Prahara, et al., 2023). Fleksibilitas ini tentu bukan berarti menyepelehkan agama, tetapi merumuskan status hukum yang lebih mudah dimengerti dan tidak terkesan kaku hanya halal dan haram. Padahal dalam pariwisata pasti akan ada dua sisi dari status hukum tersebut.

Upaya mendesain kategorisasi ini tentu diperlukan pendekatan yang terstruktur dan terukur untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan destinasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Desain kategorisasi pariwisata halal menjadi penting dalam menentukan standar dan pelayanan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan memenuhi harapan wisatawan Muslim. Mendesain kategorisasi pariwisata halal ini dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan destinasi yang ramah Muslim. Desain kategorisasi ini berfokus pada infrastruktur Ibadah yang secara fiiqh memungkinkan diterima oleh mayoritas muslim di Indonesia, khususnya di wilayah Blitar Raya.

Kategorisai ini erat kaitannya dengan ekosistem wisata (Nugroho et al., 2019) di Blitar Raya seperti makanan halal, akomodasi halal, fasilitas ibadah, aktivitas dan hiburan yang sesuai dengan syariah, serta kesesuaian budaya dan lingkungan yang nyaman. Berdasarkan hasil desain kategorisasi pariwisata halal akan dipaparkan sebagai berikut

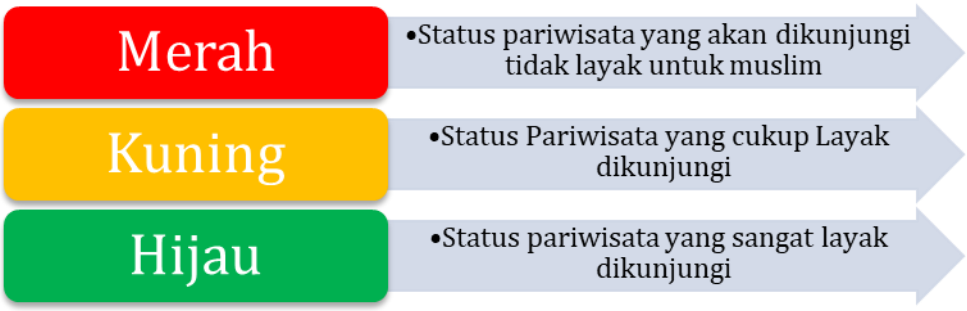

Gambar 1. Desain Kategorisasi Wisata Layak Muslim

Gambar 1. Diatas menunjukkan hasil desain kategorisasi pariwisata halal sebagai alternatif untuk digunakan dalam menilai apakah tempat wisata sudah ramah muslim atau belum. Kategorisai dengan label hijau kuning tentu disusun berdasarkan beberapa indikator dan bobot skornya. Untuk melihat secara detail dari kategorisasi yang sudah ditunjukkan dalam gambar I dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Indikator Penilaian Kategorisasi Pariwisata Halal

No	Indikator	Bobot
1.	Tersedia masjid atau fasilitas Ibadah lebih dari tiga	5
	Tersedia masjid atau fasilitas Ibadah kurang dari tiga	3
	Tidak ada tempat ibadah	1
2.	Makanan dan minuman yang dijual sudah bersertifikasi halal	5
	Makanan dan minuman yang dijual halal tapi tidak bersertifikasi halal	3
	Makanan dan minuman yang dijual haram	1
3.	Terdapat aturan pengunjung yang bukan muhrim	5
	Tidak terdapat aturan pengunjung yang bukan muhrim	3
4.	Adanya aturan terkait pakaian Islami	5
	Tidak ada aturan terkait pakaian Islami	1
5.	Terdapat buku panduan wisata untuk muslim	5
	Tidak terdapat buku panduan wisata untuk muslim	3
6.	Tersedianya hotel syariah	5
	Tidak tersedianya hotel syariah	3
7.	Tersedianya pembayaran berbasis syariah	5
	Tidak tersedia pembayaran berbasis syariah	3
8.	Terdapat pengawas tempat wisata	5
	Tidak terdapat pengawas tempat wisata	3
9.	Terdapat tourguide Islami	5
	Tidak terdapat tourguide Islami	3
10.	Adanya larangan membawa anjing	5
	Tidak ada larangan membawa anjing	3
	Terdapat anjing liar	1
11.	Terdapat tempat bersuci	5
	Tidak terdapat tempat bersuci	3
12.	Hiburan menonjolkan kesoposan dan Islami	5
	Terdapat hiburan yang menonjolkan keseksian baik perempuan atau lelaki	1
13.	Tidak ada penjual minuman keras	5
	Terdapat penjual minuman keras	1

14.	Tempat bersih dan suci	5
	Tempat bersih tapi diragukan kesuciannya	3
	Tempat tidak bersih dan suci	1
15.	Pengelola wisata bersikap ramah	5
	Pengelola wisata bersikap biasa biasa	3
	Pengelola wisata bersikap jahat	1
16.	Terdapat tempat khusus untuk menyusui	5
	Tidak Terdapat tempat khusus untuk menyusui	3
17.	Terdapat daftar harga barang yang dijual	5
	Tidak Terdapat daftar harga barang yang dijual	3
18.	Tersedia toilet umum	5
	Tidak tersedia toilet umum	1
19.	Tersedia kotak infaq dan sedekah	5
	Tidak Tersedia kotak infaq dan sedekah	3
20.	Non-Muslim diizinkan masuk ketempat wisata	5
	Non-Muslim Tidak diizinkan masuk ketempat wisata	1

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan tabel diatas total bobot penilaian adalah 100 poin dan penilaianya disesuaikan dengan beberapa tempat wisata di Blitar raya. Penilaian tersebut akan dibagi dalam tiga kategori yaitu hijau dengan pon 86 – 100, Kuning 70 – 85 dan merah 0 – 69. Dengan adanya kategorisasi dan indikator penilaian yang sudah didesain dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mempercepat pelabelan pariwiasata yang layak atau ramah untuk muslim. Indikator diatas tentu akan lebih mudah dilabelkan kepada tempat wisata di Blitar Raya karena berbasis skor tertentu berdasarkan penilaian dimasing – masing tempat wisata di Biltar Raya. Harapannya dengan adanya kategorisasi ini, wilayah Blitar Raya akan bisa meminimalisir ketidak pastian wisata halal yang selama ini hanya klaim menjadi pelabelan wisaya layak atau ramah muslim berdasarkan penilaian dan pengamatan dimasing – masing lokasi wisata dengan indikator yang lebih mudah selain pemberian status hukum haram atau halal yang lebih kaku.

Digitalisasi Pariwisata sebagai Solusi untuk Meningkatkan Kualitas Pariwisata Halal di Blitar Raya.

Pariwisata halal telah menjadi sektor yang semakin penting dan menarik perhatian masyarakat luas. Sehingga ketika ada gagasan adanya pariwisata ramah muslim didesain di Blitar Raya akan berdampak pada meningkatnya preferensi masyarakat karena mayoritas pengunjung tempat wisata di Blitar adalah Muslim. Dalam era teknologi digital yang terus berkembang, digitalisasi pariwisata halal melalui aplikasi Android bisa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman wisata halal (Fitriani & Indra Marzuki, 2020), termasuk digitalisasi wisata ramah muslim di Blitar Raya

Salah satu keuntungan utama digitalisasi pariwisata halal melalui digitalisasi adalah kemudahan akses informasi (Putri, 2019). Kemudahan ini dapat dilihat dengan mudahnya wisatawan baik lokal maupun mancanegara

dapat melihat status kelayakan pada wisata yang akan dikunjungi oleh muslim melalui aplikasi android yang tersedia di smartphone. Hal ini dikuatkan dengan data yang diperoleh di Blitar Raya pada rentang waktu bulan april sampai mei bahwa 84% dari responden menginginkan adanya aplikasi yang memudahkan wisatawan melacak status kelayakan wisata untuk muslim melalui aplikasi, dan 76% menganggap hal tersebut masih belum penting. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini memungkinkan wisatawan membantu untuk memberikan penilaian dengan indikator yang sudah dipaparkan sebelumnya sehingga mampu mendorong perceatan informasi kepada para wisatawan tentang kelayakan wisata untuk muslim di Blitar Raya.

Digitalisasi pariwisata halal didesain supaya wisatawan Muslim dapat dengan mudah mengakses informasi terkait destinasi wisata halal, makanan halal, akomodasi halal, dan fasilitas ibadah di Blitar Raya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian di Blitar Raya selama rentang waktu April sampai Mei bahwa 76% responden menginginkan informasi tentang adanya fasilitas ibadah di tempat wisata. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini akan mendorong tersedianya informasi yang lengkap dan terperinci tentang destinasi yang ramah Muslim, sehingga wisatawan dapat membuat keputusan yang lebih baik saat merencanakan perjalanan mereka. Selain itu, Digitalisasi ini akan mempermudah untuk juga melakukan pencarian destinasi wisata halal di Blitar Raya. Wisatawan Muslim dapat mencari destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka, seperti tempat wisata alam yang indah, objek wisata sejarah, atau pusat perbelanjaan yang menawarkan produk halal. Fitur ini akan membantu wisatawan Muslim menemukan destinasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka dengan mudah dan efisien.

Selain itu, digitalisasi pariwisata halal melalui aplikasi memberikan fitur yang sangat perhatian terhadap fasilitas ibadah. Aplikasi ini dapat menyediakan informasi tentang masjid, mushola, atau ruang shalat yang mudah diakses tempat wisata di Blitar Raya. Fitur pengingat waktu shalat juga dapat ditambahkan dalam aplikasi untuk membantu wisatawan Muslim menjalankan ibadah mereka dengan lebih baik. Tidak hanya itu, fungsi dari digitalisasi ini dapat menyediakan ulasan dan rekomendasi dari pengguna. Fitur ini memungkinkan wisatawan Muslim untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengunjungi destinasi wisata di Blitar Raya. Sehingga pengguna aplikasi sebagai produk dari digitalisasi pariwisata halal akan semakin berkembang dan bisa dievaluasi penilaiannya secara berkala. Ulasan dan rekomendasi ini akan membantu wisatawan lain dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memilih destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka yang tentunya sesuai dengan nilai – nilai ajaran Islam.

Secara keseluruhan, digitalisasi pariwisata halal melalui aplikasi Android merupakan alternatif solusi ideal untuk meningkatkan kualitas pariwisata halal di Blitar Raya. Kemudahan akses informasi, pencarian destinasi halal, informasi makanan halal, fasilitas ibadah, dan ulasan dari pengguna semuanya berkontribusi dalam memberikan pengalaman wisata halal yang lebih baik dan memperkuat posisi Blitar Raya sebagai tujuan pariwisata halal yang berkualitas. Dengan terus mendorong digitalisasi pariwisata halal di Blitar Raya sama halnya

dengan mendorong kemajuan pariwisata ramah muslim di Blitar Raya dan akan semakin diminati oleh wisatawan Muslim dari berbagai wilayah.

Digitalisasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan Informasi wisatawan (Nitimanta et al., 2023) tentang ketersediaan pariwisata ramah muslim di Blitar Raya. Fakta di Blitar Raya seringkali mendapat informasi yang tidak jelas atau tidak memadai sehingga muncul keraguan terntang konsep pariwisata halal di Blitar Raya. Hal ini dapat membuat wisatawan Muslim sulit untuk memahami dengan pasti apakah destinasi atau layanan yang mereka kunjungi benar-benar memenuhi standar pariwisata halal. Selain itu, informasi yang terbatas semakin diperparah dengan kualitas layanan halal yang tidak konsisten. Seluruh pelaku wisata dan ekosistem ekonomi yang ada didalamnya pasti akan mengkalim bahwa yang dilakukan atau yang dijual semuanya halal. Namun, hal ini tidak sesuai dengan data terkait penilaian atau sertifikasi pelabelan halal yang kredibel. Misalnya di tempat wisata taman sentul yang menawarakan keindahan taman tetapi toilet umum yang tersedia faktanya tidak terawat dan sangat diragukan kesuciannya sehingga belum layak disebut sebagai wisata layak muslim. Maka dari itu, perselihian tentang klaim ini bisa diminimalisir dengan digitalisasi yang mampu untuk mengukur dengan skor yang pasti dan indikator yang jelas. Sehingga baik wisatawan dan semua yang ada dalam ekonomistem pariwisata akan mengtahui seberapa layak tempat wisata di Blitar Raya yang dikunjungi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang kategorisasai wisata layak muslim, ketidak pastian pada pariwisata halal dan digitalisasi pariwisata halal dapat datarik beberapa kesimpulan. Pertama adalah Pariwisata halal yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian implementasi fiqih. Hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian pariwisata halal, ketika dilihat dari sudut pandang teori ketidakpastian, membuat kita menyadari bahwa ketidakpastian memang merupakan fenomena yang biasa dalam bidang ekonomi dan kepastian dari pawisata halal adalah ketidak pastian dari wisata halal itu sendiri. Kesimpulan kedua, ketidak pastian pada pariwisata halal dapat diminimalisir dengan upaya kategorisasi wisata layak muslim mulai dari kategori merah yang artinya tidak layak, kuning yang artinya masih layak tetapi perlu kehati – hatian dan hijau artinya wisata yang dikunjungi sangat layak untuk muslim. Kesimpulan ketiga, dengan adanya kategorisasi itu maka perlu didukung dengan adanya digitalisasi untuk mendorong tersedianya kepastian informasi terkait layak atau tidaknya wisata untuk muslim di Blitar Raya.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memeiliki keterbatasan dengan demikian, anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Mahalli (Al), J. & Jalaluddin As-Suyuthi. (2008). *Tafsir Al-Jalalain* (Terjemah). Sinar Baru Algensindo.

Ali, M. (2018). Ijtihad Dan Transformasi Ekonomi Islam. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, *56*(1), 1–18.

Choirunnisa, R., & Firmansyah, E. A. (2021). Muslim Behaviour And Purchase. *Journal Of Economic Studies*, *5*(1).

Deffains, B., Romain Espinosa, & Christian Thöni. (2016). Political Self-Serving Bias And Redistribution. *Ournal Of Public Economics*, *137*, 67-74.

Erawati, T. & Gloria Maindo Mau Pelu. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, *12*(3), 74-83.

Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. *Aspirasi: Jurnal Masalah - Masalah Sosial*, *8*, 1.

Fahmi, M. F., Binti Mutafarida, & Ahmad Hanif Fajrin. (2023). The Concept Of Profit Sharing On Deposits Sharia In Islamic Bank For Non-Muslim Market. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7*(4), 78.

Fahmi, M. F., Prahara, R. S., & Mutafarida, B. (2023). The Urgency Of Halal Cosmetics (Halal Cleanliness) As One Of The Sharia Tourism Travel Packs In Mojokerto. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)*, *6*(2), 741–757.

Fahmi, M. F., Shonhaji Sholeh, Ali Arifin, Iskandar Ritonga, & Lathoif. (2021). Literature Study On Traditional Javanese Economic. *Iosr Journal Of Economics And Finance (Iosr-Jef)*, *12*(3), 16.

Fernardo, E., Astrid Kusuma Rahardaya, & Irwansyah. (2020). Studi Meta-Analisis Pengurangan Ketidakpastian Di Era Digital: Pencarian Informasi Di Media Sosial Sebelum Pertemuan Tatap Muka Pertama. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 4*(2), 113-131.

Fikriyah, K. (2021). Fikriyah, Khusnul. "Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya Dalam Muamalah? *Nomicpedia: Journal Of Economics And Business Innovation*, *1*(2), 80.

Fitriani & Indra Marzuki. (2020). Analisis Penerapan Aspek Syariah Pada Digitalisasi Bisnis Pariwisata Halal. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *4*(2), 80–95.

Ibrahim, F. (2017). Urf Sebagai Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 87-98.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Shariah Indonesia 2019–2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Zahir Syariah Indonesia.

Mastercard-Crescentrating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report*. Gmti.

May F.A, Aulia N., & A. F. Hidayatullah. (2020). Wisata Halal Trend Baru Industri Pariwisata Korea Selatan. *Jurnal Penelitian*, *14*(1), 153-165.

Muspita, N. C. (2022). Membangun Jiwa Nasionalisme Dan Solidaritas Sosial Melalui Diklat Terpadu Dasar (Dtd) Pada Pac. Gp Ansor Sukorejo Kota Blitar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk), 4*(6), 10808–10813.

Nitimanta, N. M., Fauzia, N. P. S., & Azijah, D. N. (2023). Analisis Strategi Pemerintah Desa Pancakarya Dalam Keterlambatannya Menuju Konsep Smart Village. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, *1*(4), 238–243.

Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Perisai: Islamic Banking And Finance Journal, 3*(2), 92–104.

Putri, K. Y. S. (2019). Wisata Halal Muslim Milenial. *Jurnal Common*, *3*(2), 153-166.

Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1), 3.

Usrah, C. R. A., Moh Farih Fahmi, & Binti Mutafarida. (2021). Al Usrah, C. R., Mutafarifa, B., & Fahmi, M. F. (2021). Persepsi Muslim, Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah. *Ar Rehla: Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, And Creative Economy*, *1*(1), 30.